

## Faktor Penghambat dan Solusi Peningkatan Efektivitas Kebijakan Pembangunan Industri dan Jasa Maritim di Provinsi Kepulauan Riau

Ardi Putra <sup>1,\*</sup>; Eki Darmawan <sup>2</sup>; Sayed Fauzan Riyadi <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia; [ardi@umrah.ac.id](mailto:ardi@umrah.ac.id); [ekidarmawan@umrah.ac.id](mailto:ekidarmawan@umrah.ac.id); [sayedfauzan@umrah.ac.id](mailto:sayedfauzan@umrah.ac.id)

\*Correspondence : [ekidarmawan@umrah.ac.id](mailto:ekidarmawan@umrah.ac.id)

### ABSTRAK

Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi maritim yang besar. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pembangunan industri dan jasa maritim di wilayah ini. Namun, masih terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan solusi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim di Kepulauan Riau. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber penelitian terdahulu dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat utama meliputi kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas, serta kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan. Solusi yang diusulkan meliputi pengembangan infrastruktur, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, diharapkan efektivitas kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim di Kepulauan Riau dapat meningkat, sehingga potensi maritim yang dimiliki wilayah ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

### Kata kunci

*Efektifitas, Industri, Jasa, Kebijakan, Maritim*

### ABSTRACT

Riau Islands is one of the provinces in Indonesia that has great maritime potential. Therefore, the Indonesian government has implemented various policies to increase the development of maritime industries and services in this region. However, there are still obstacles that affect the effectiveness of these policies. This research aims to analyse the inhibiting factors and solutions to improve the effectiveness of maritime industry and services development policies in the Riau Islands. The method used is a literature study by collecting and analysing data from various sources of previous research and policy documents related to this issue. The results show that the main inhibiting factors include the lack of infrastructure and qualified human resources, as well as the lack of coordination between stakeholders. Proposed solutions include infrastructure development, human resource training and development, and better coordination between the government, community and private sector. By implementing these solutions, it is hoped that the effectiveness of maritime industry and services development policies in the Riau Islands can increase, so that the region's maritime potential can be optimally utilised to improve economic growth and community welfare..

### Keywords

*Effectiveness, Industry, Services, Policy, Maritime*

## Pendahuluan

Industri dan jasa maritim merupakan sektor penting dalam perekonomian global yang mengelola dan memfasilitasi pergerakan barang dan orang melalui laut. Menurut data dari International Maritime Organization (IMO), sekitar 80% perdagangan dunia diangkut melalui jalur laut, dan sektor maritim memberikan kontribusi signifikan terhadap perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang memiliki akses ke laut (IMO, 2023). Industri dan jasa maritim terdiri dari berbagai kegiatan, termasuk transportasi laut, pelayaran, perkapalan, logistik, dan konstruksi kapal. Seiring dengan perkembangan teknologi, sektor maritim juga semakin bergerak menuju digitalisasi dan otomatisasi dalam pengelolaan dan pengoperasian kapal, terminal, dan rantai pasokan maritim secara keseluruhan (Han & goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, 2020). Meskipun memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian global, industri dan jasa maritim juga memiliki tantangan dan risiko yang signifikan, termasuk ketergantungan yang tinggi pada faktor eksternal seperti cuaca dan kondisi laut, risiko keamanan, dan risiko lingkungan seperti polusi laut dan perubahan iklim. Oleh karena itu, perlu adanya upaya terus-menerus dalam meningkatkan keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan sektor maritim secara keseluruhan.

Menurut Bank Dunia, sektor maritim memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, terutama di negara-negara berkembang dan pulau-pulau kecil yang bergantung pada perdagangan laut (World Bank, 2021). Namun, sektor ini juga memiliki dampak lingkungan dan sosial yang signifikan, termasuk masalah polusi udara dan laut, risiko kecelakaan, dan pekerjaan yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, Bank Dunia menekankan pentingnya memperkuat regulasi dan kerja sama internasional untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan sektor maritim secara keseluruhan.

Selain itu, penelitian oleh yang dilakukan Zhang, dkk menyoroti pentingnya inovasi dan teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor maritim (Zhang et al., 2021). Mereka menemukan bahwa penggunaan teknologi digital, seperti *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence* (AI), dapat membantu mengoptimalkan penggunaan kapal, mengurangi emisi dan biaya, serta meningkatkan keamanan dan kinerja keseluruhan sektor maritim. Namun, implementasi teknologi ini juga dapat menghadirkan tantangan baru dalam hal keamanan siber dan privasi data, serta memerlukan investasi besar dalam infrastruktur dan sumber daya manusia yang terampil. Oleh karena itu, Zhang dan koleganya menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antara pemerintah, industri, dan lembaga penelitian untuk mempromosikan inovasi dan pengembangan teknologi yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam sektor maritim.

Menurut data dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2020), industri dan jasa maritim di Indonesia terus mengalami perkembangan yang positif

dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, total kapasitas angkutan laut mencapai 148,6 juta DWT dan jumlah pelabuhan mencapai 574 pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, sektor maritim juga memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian Indonesia, dengan menyumbang sekitar 13,4% terhadap PDB nasional pada tahun 2019 (Direktur Jenderal Perhubungan Laut, 2020).

Namun, sektor maritim di Indonesia juga menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk infrastruktur yang terbatas, perizinan yang rumit, serta kurangnya investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi. Untuk mengatasi tantangan ini, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program dan inisiatif untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan sektor maritim, seperti program peningkatan kapasitas angkutan laut dan pengembangan kawasan industri maritim. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam kerja sama internasional untuk mempromosikan pengembangan sektor maritim yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam skala regional dan global. Sebagai contoh, Indonesia adalah salah satu negara pendiri Indian Ocean Rim Association (IORA), sebuah organisasi yang bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama dalam bidang ekonomi, keamanan, dan lingkungan di kawasan Samudera Hindia.

Ada potensi besar untuk meningkatkan daya saing sektor maritim di Indonesia melalui pengembangan industri maritim dan penerapan teknologi yang lebih canggih. Sektor industri maritim, seperti pembangunan kapal, perbaikan dan pemeliharaan kapal, serta produksi peralatan dan komponen maritim, memiliki potensi untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dalam sektor maritim. Selain itu, jika menyoroti pentingnya penerapan teknologi canggih, seperti IoT dan big data, dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor maritim tentunya dalam penerapan teknologi ini dapat membantu mengoptimalkan penggunaan kapal, meningkatkan keamanan, dan mengurangi biaya dan waktu operasi. Namun, tantangan dalam mengembangkan sektor maritim di Indonesia masih cukup besar, terutama dalam hal regulasi, perizinan, dan infrastruktur. Sebagai contoh, masih terdapat kekurangan infrastruktur pelabuhan yang modern dan efisien, serta kebijakan yang masih belum mendukung penuh pengembangan industri maritim.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, industri, dan lembaga akademik untuk memperkuat kapasitas dan daya saing sektor maritim di Indonesia (Rasman Manaf et al., 2015). Tentu yang menjadi sorotan adalah tentang pentingnya meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi, serta memperbaiki regulasi dan perizinan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi pengembangan sektor maritim.

Jika melihat pada Provinsi Kepulauan Riau, menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau (2020), industri dan jasa maritim merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Pada

tahun 2019, sektor ini menyumbang sekitar 46,78% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki potensi besar dalam pengembangan industri maritim dan pariwisata bahari. Dalam rangka meningkatkan pengembangan sektor maritim, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah meluncurkan berbagai program dan kebijakan, seperti Program Kepulauan Riau Bersih dan Program Kepulauan Riau Berdaya. Namun, sektor maritim di Provinsi Kepulauan Riau juga menghadapi tantangan yang signifikan, seperti kurangnya infrastruktur yang memadai dan kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas di sektor maritim. Untuk mengatasi tantangan ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengambil berbagai langkah, seperti meningkatkan investasi dalam infrastruktur pelabuhan dan transportasi laut, serta meningkatkan pelatihan dan pendidikan dalam bidang maritim.

Selanjutnya, Provinsi Kepulauan Riau juga aktif dalam kerja sama regional dan internasional untuk mempromosikan pengembangan sektor maritim yang berkelanjutan. Sebagai contoh, pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjalin kerja sama dengan pemerintah Singapura dalam pengembangan industri maritim dan pariwisata bahari di wilayah tersebut.

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan salah satu daerah strategis di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam sektor industri dan jasa maritim. Namun, dalam implementasi kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim, terdapat sejumlah faktor penghambat yang dapat menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang tepat guna meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Peningkatan efektivitas kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim menjadi sebuah kebutuhan yang penting untuk diambil. Sejumlah solusi inovatif dan terukur perlu diidentifikasi dan diimplementasikan guna mengatasi kendala-kendala tersebut. Peningkatan efektivitas kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah ini, tetapi juga akan mendukung peran strategis Provinsi Kepulauan Riau dalam mengelola potensi maritimnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat yang ada dan mengusulkan solusi konkret untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan sektor industri dan jasa maritim di wilayah ini, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait permasalahan dan solusi yang dibutuhkan. Untuk melihat lebih jauh pengembangan Industri dan Jasa Maritim di Provinsi Kepulauan Riau, akan dibahas lebih jauh pada artikel ini dengan menggunakan pendekatan faktor dalam peningkatan efektivitas kebijakan pembangunan.

## Metode

Penelitian mengenai faktor penghambat dan solusi peningkatan efektivitas kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim di Kepulauan Riau ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *literature review*. Studi kasus dilakukan dengan memilih Kepulauan Riau sebagai lokasi penelitian karena daerah ini memiliki potensi maritim yang besar dan telah melaksanakan kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim selama beberapa tahun terakhir. Data dikumpulkan dengan memetakan dokumen kebijakan yang ada dari berbagai pihak atau lembaga terkait, yang memiliki ke terkaitan dengan pembangunan industri dan jasa maritim di Kepulauan Riau. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap infrastruktur dan kegiatan yang berhubungan dengan industri dan jasa maritim di Kepulauan Riau. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan

Efektivitas kebijakan pembangunan menjadi perhatian penting di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Efektivitas kebijakan pembangunan adalah kemampuan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan (Saputra et al., 2022). Efektivitas kebijakan pembangunan menjadi penting karena pembangunan yang efektif dapat membawa dampak positif bagi masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup. Namun, untuk mencapai efektivitas kebijakan pembangunan tidaklah mudah. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan pembangunan antara lain adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan pengelolaan keuangan yang baik. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor lingkungan, sosial, politik, dan ekonomi yang berada di luar kendali pemerintah (Pathony et al., 2020).

Selain itu, efektivitas kebijakan pembangunan juga dapat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan yang diambil (Turisno et al., 2018). Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pembangunan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan. Beberapa kebijakan tersebut antara lain adalah pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, masih terdapat banyak tantangan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan di Indonesia, seperti masalah korupsi, ketimpangan regional, dan pengelolaan sumber daya alam yang buruk (Agasi et al., 2020).

Efektivitas kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim juga menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari peran strategis kedua sektor ini dalam mendukung perekonomian nasional. Menurut data dari

Kementerian Perindustrian, industri maritim di Indonesia tumbuh 5,88% pada 2019 dan menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB Indonesia. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam efektivitas kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim di Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pembangunan adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (Ma'rif et al., 2010). Keberhasilan pembangunan yang tepat dan akurat dapat meningkatkan efektivitas kebijakan (Setianingsih, 2015).

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan (Elvina & Zebua, 2019). Dalam konteks industri dan jasa maritim, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan nelayan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor maritim (Subagiyo et al., 2017). Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam memastikan koordinasi yang baik antar lembaga dan memilih indikator yang tepat serta memastikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan industri dan jasa maritim sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Hal ini sejalan dengan pandangan Nawawi (2012) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemerintahan merupakan konsep penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Nawawi, 2012).

Studi yang dilakukan oleh Rusfiana (2022) menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pembangunan industri maritim di Provinsi Kepulauan Riau masih perlu ditingkatkan (Rusfiana, 2022). Darmawan, et al., (2020) juga menjelaskan, kebijakan maritim yang baik harus mampu mengintegrasikan dimensi keamanan, pertahanan, ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya yang pada akhirnya menciptakan dampak positif secara berkelanjutan bagi masyarakat dan negara. Kebijakan maritim juga harus mampu memperkuat koordinasi antar sektor dan antar lembaga, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan sektor maritim (Darmawan & Harimas Ginting, 2020).

Melihat literatur yang telah dibahas diatas menunjukkan faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah kurangnya koordinasi antar instansi dan keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara konsep pembangunan industri maritim yang diusung dengan kondisi nyata di lapangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan ketergantungan terhadap importasi bahan baku (Ibrahim & Halkam, 2021). Pentingnya peningkatan efektivitas kebijakan pembangunan jasa maritim di Kepulauan Riau dapat diminimalisir dengan memperkuat faktor yang mempengaruhi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kualitas infrastruktur, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sektor jasa maritim. Selain itu, ada juga faktor yang mempengaruhi seperti masih terdapatnya permasalahan terkait dengan perizinan dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan sektor jasa maritim di Kepulauan Riau (Harefa, 2013).

Tidak dapat dipungkiri bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi yang besar dalam pengembangan industri dan jasa maritim. Potensi tersebut terlihat dari posisi strategis Kepulauan Riau sebagai jalur perdagangan internasional, serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti perikanan dan kelautan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu terus berupaya meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim dengan melakukan koordinasi yang lebih baik antarinstansi dan pihak terkait serta mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim di Kepulauan Riau. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat setempat, serta memberdayakan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengembangan industri dan jasa maritim di daerahnya. Jasa maritim juga menjadi potensi yang baik di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat potensi besar dalam pengembangan sektor jasa maritim di Kepulauan Riau, terutama dalam bidang transportasi laut, logistik, dan pariwisata. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan jasa maritim dengan memperbaiki infrastruktur dan memberdayakan sumber daya manusia yang ada, serta memperbaiki perizinan dan regulasi yang berkaitan dengan sektor jasa maritim.

Pentingnya pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan jasa maritim di Kepulauan Riau dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkaitan dengan sektor jasa maritim, serta memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pembangunan industri dan jasa maritim di Provinsi Kepulauan Riau. Faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pembangunan industri maritim di Kepulauan Riau antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, rendahnya kualitas infrastruktur, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sektor industri dan jasa maritim. Selain itu, masih terdapat permasalahan terkait dengan perizinan dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan sektor industri dan jasa maritim di Kepulauan Riau. Dalam konteks pembangunan jasa maritim, juga menemukan faktor-faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia (Mukhlis & Setyadiharja, 2017), rendahnya kualitas infrastruktur (Darmawan & Nurmandi, 2015), dan kurangnya dukungan regulasi dan perizinan (Rahayu & Junior, 2021). Selain itu, permasalahan logistik dan transportasi yang belum optimal juga menjadi faktor penghambat dalam pengembangan sektor jasa maritim di Kepulauan Riau (Suwarno et al., 2021).

Dari hasil telaah literature yang telah dilakukan dapat dijabarkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan industri dan jasa maritim di Provinsi Kepulauan Riau diantaranya: 1). Infrastruktur yang Belum Optimal. Faktor penghambat pertama yang perlu diatasi adalah kondisi infrastruktur yang belum optimal di Provinsi Kepulauan Riau. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti jaringan transportasi dan pelabuhan yang kurang efisien, dapat menghambat arus logistik dan distribusi barang. Oleh karena itu, perlu adanya investasi dan perbaikan infrastruktur yang memadai guna mendukung kegiatan industri dan jasa maritim di wilayah ini. 2). Peraturan yang Kompleks. Peraturan yang kompleks dan seringkali tumpang tindih dapat menjadi hambatan serius dalam implementasi kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim. Diperlukan reformasi peraturan dan kebijakan yang lebih terintegrasi, serta penyederhanaan prosedur perizinan. Langkah-langkah ini akan membuka jalan bagi pelaku industri untuk lebih mudah beroperasi, mendorong investasi, dan meningkatkan daya saing Provinsi Kepulauan Riau dalam skala nasional maupun internasional. 3). Kurangnya Investasi. Kurangnya investasi menjadi kendala serius dalam mengembangkan sektor industri dan jasa maritim. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan promosi investasi yang lebih intensif, baik dalam maupun luar negeri. Pemerintah provinsi dapat menggandeng sektor swasta dan pihak asing untuk meningkatkan akses modal dan teknologi yang diperlukan untuk pertumbuhan sektor ini. 4). Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya kelautan yang melimpah, tetapi pengelolaannya masih menghadapi tantangan. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam pengembangan teknologi dan kebijakan yang berkelanjutan untuk menjaga ekosistem laut yang sehat dan produktif. Pengelolaan sumber daya kelautan yang baik akan mendukung kelangsungan industri perikanan dan pariwisata, dua sektor yang sangat bergantung pada keberlanjutan ekosistem laut. 5). Peran Pemerintah dan Keterlibatan Masyarakat

Peran pemerintah dalam memfasilitasi dan mendorong partisipasi masyarakat lokal sangat penting. Melalui perencanaan yang inklusif dan program pelibatan masyarakat, dapat tercipta sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat akan meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim, sekaligus memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan faktor-faktor penghambat yang telah diidentifikasi, beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim di Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terkait dengan industri dan jasa maritim melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan sektor tersebut.

- 2) Meningkatkan kualitas infrastruktur, terutama di bidang transportasi dan logistik, untuk memudahkan distribusi barang dan jasa.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sektor industri dan jasa maritim dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.
- 4) Memperbaiki regulasi dan perizinan yang terkait dengan sektor industri dan jasa maritim agar dapat mendukung pengembangan sektor tersebut dengan lebih efektif.
- 5) Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengembangan sektor industri dan jasa maritim untuk menciptakan sinergi dan mempercepat pertumbuhan sektor tersebut.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan efektivitas kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim di Provinsi Kepulauan Riau dapat ditingkatkan dengan melakukan kajian-kajian terlebih dahulu sebagai *evidence based policy* (Samudra et al., 2023) sebelum pemerintah membuat atau memutuskan kebijakan terkait industri dan jasa maritim, sehingga sektor tersebut dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa industri dan jasa maritim merupakan sektor yang strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan sektor tersebut di Provinsi Kepulauan Riau, perlu memperhatikan beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, serta regulasi dan perizinan yang masih kompleks. Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, dapat dilakukan solusi-solusi seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas infrastruktur, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperbaiki regulasi dan perizinan, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan efektivitas kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim di Provinsi Kepulauan Riau dapat ditingkatkan, sehingga sektor tersebut dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dapat berdampak positif pada peningkatan perekonomian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

## Referensi

Agasi, A. P., Sitorus, A. A. N. S., Prasalengga, A., Inayati, A., Indriyani, A. F., Dewi, C. P., Sari, E. Y. J. M., Kirana, M. C., Fauzia, S. N., & Rumah, P. P. (2020). *Strategi Pemberantasan Korupsi: Buku Pendidikan Antikorupsi*. Penerbit Pustaka Rumah

C1nta.

- Darmawan, E., & Harimas Ginting, A. (2020). Tata Kelola Kebijakan Maritim di Indonesia dalam Perspektif Sound Governance. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 12(1), 36–50. <https://doi.org/10.33701/jt.v12i1.822>
- Darmawan, E., & Nurmandi, A. (2015). Agenda Setting dalam Perencanaan Pembangunan Perbatasan di Kepri Tahun 2015. *Journal of Governance and Public Policy*, 2(3).
- Direktur Jenderal Perhubungan Laut. (2020). *Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KP.936/DJPL/2020 (Issue 8)*. [https://hubla.dephub.go.id/storage/portal/documents/post/12938/rencana\\_strategis\\_direktorat\\_jenderal\\_perhubungan\\_laut.pdf](https://hubla.dephub.go.id/storage/portal/documents/post/12938/rencana_strategis_direktorat_jenderal_perhubungan_laut.pdf)
- Elvina, E., & Zebua, M. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Pembangunan Program Dana Desa sebagai Variabel Intervening. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(1), 1–9.
- Han, E. S., & goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, A. (2020). Review of Maritime Transport 2020. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). [https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2020\\_en.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2020_en.pdf)
- Harefa, M. (2013). Struktur Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Potensial Kota Batam dan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4(2), 175–193.
- Ibrahim, H. R., & Halkam, H. (2021). Perdagangan Internasional & Strategi Pengendalian Impor. *Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)*.
- IMO. (2023). *Tema 2023: 50 Tahun MARPOL — Komitmen kami terus berlanjut*. Organisasi Maritim Internasional. <https://indonesia.un.org/id/246887-hari-maritim-dunia-28-september>
- Ma'rif, S., Nugroho, P., & Wijayanti, L. (2010). Evaluasi efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kota Semarang. *Riptek*, 4(11), 53–62.
- Mukhlis, S., & Setyadiharja, R. (2017). Community Development Dengan Internalisasi Nilai Budaya Maritim Di Provinsi Kepulauan Riau Untuk Memperkuat Provinsi Berbasis Kemaritiman. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 2(1), 37–51. <https://doi.org/10.24905/jip.2.1.2017.37-51>
- Nawawi, J. (2012). Membangun kepercayaan dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 19–29.
- Pathony, T., Yuhana, K., & Kusnadi, I. H. (2020). Efektivitas Program Pemberdayaan Nelayan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang (Studi Kasus Di Kecamatan Blanakan). *The World of Business Administration Journal*.
- Rahayu, S., & Junior, J. J. (2021). Optimalisasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Studi Kasus Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal*

- Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 9(2), 64–78.
- Rasman Manaf, Yanuar, Y., Hutahean, A. A., Ibnu sina, F. irman, Caniago, A., Sa'badini, S. A., Alisafir, S., Mangkurat, R. S. B., Utari, R. D., & Rumingkang, N. S. (2015). Menata Ruang Laut Indonesia. In *Deputi Sumber Daya maritim Kemenkomarves RI* (Vol. 3).
- Rusfiana, Y. (2022). Upaya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Potensi Maritim (Suatu Studi di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Langsung*, 9(1).
- Samudra, A. A., Suradika, A., & Kadarisman, M. (2023). *Implementasi Kebijakan Publik & evidence-Base Policy*. Samudra Biru.
- Saputra, M. Y., Karmeli, E., & Fitriani, N. (2022). Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa. *Samalewa: Jurnal Riset & Kajian Manajemen*, 2(2), 166–174. <https://doi.org/10.58406/samalewa.v2i2.1017>
- Setianingsih, B. (2015). *Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda)(Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang)*. Brawijaya University.
- Subagiyo, A., Wijayanti, W. P., & Zakiyah, D. M. (2017). *Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*. Universitas Brawijaya Press.
- Suwarno, P., Sumantri, S. H., & Bahar, F. (2021). Rekonstruksi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Wilayah (Studi Di Kabupaten Natuna Periode Tahun 2019-2020). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 65–89.
- Turismo, B. E., Suharto, R., & Priyono, E. A. (2018). Peran serta masyarakat dan kewenangan pemerintah dalam konservasi mangrove sebagai upaya mencegah rob dan banjir serta sebagai tempat wisata. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), 479–497.
- World Bank. (2021). *Charting a Course for Decarbonizing Maritime Transport*. The World Bank. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/04/15/charting-a-course-for-decarbonizing-maritime-transport>
- Zhang, X., Wang, C., Jiang, L., An, L., & Yang, R. (2021). Collision-avoidance navigation systems for Maritime Autonomous Surface Ships: A state of the art survey. *Ocean Engineering*, 235(January), 109380. <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2021.109380>